



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 4 No. 2 Tahun 2021

Doi : 10.21043/politea.v4i2.10538

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

---

## **Alasan Pemerintah Arab Saudi Mendukung China dalam Kasus Diskriminasi Muslim Uighur**

**Yesya Ichsaniah Putri, Sidiq Ahmadi**

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia*

*[yesyaichsaniah1@gmail.com](mailto:yesyaichsaniah1@gmail.com), [sidiqahmadi@umy.ac.id](mailto:sidiqahmadi@umy.ac.id)*

### **Abstract**

This journal article focuses on the issue of discrimination against Uighur Muslims in China. The purpose of this study is to describe the response of Saudi Arabia to the discrimination cases against Uighur Muslims in China. This study also tries to find out the reason behind the response and Saudi Arabia's policies on this issue. This is a qualitative research, using Rational Choice approach to analyze the attitude of Saudi Arabia's government behind their decision, and the source of analysis come from the articles and journals. Based on the analysis, this research found that there is one strong reason why Saudi Arabia chose to remain silent about the discrimination cases of Uighur Muslims and sided with China when western countries condemned the Chinese government's actions against discrimination Uighur Muslims. Furthermore, this research is limited in scope by only discussing and focusing in economic, so this research can be refined by further research by discussing and focusing on several things that have not been explained in more detail in this study.

Keywords: Discrimination; Uighur Muslims; Response; Saudi Arabia.

### **Abstrak**

Artikel jurnal ini memiliki fokus pada isu diskriminasi muslim Uighur di China. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana respon dari Arab Saudi, terhadap kasus diskriminasi muslim Uighur di China. Tujuan lebih lanjut dari penelitian ini juga untuk mencari tau apa alasan di balik respon dan kebijakan Arab Saudi atas isu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan Pilihan Rasional untuk menganalisa sikap dari pemerintah Arab Saudi di balik keputusan mereka, dan sumber penelitian dari artikel jurnal ini berasal dari kumpulan literatur akademik seperti jurnal dan makalah, serta kumpulan dari beberapa artikel jurnalistik. Berdasarkan analisis, penelitian ini menemukan bahwa terdapat satu alasan kuat mengapa Arab Saudi memilih untuk bungkam tentang kasus diskriminasi muslim Uighur dan beraliansi dengan China ketika negara – negara barat mengutuk tindakan pemerintah China atas diskriminasi muslim Uighur. Selanjutnya, penelitian ini terbatas dari segi jangkauannya dengan hanya membahas dan berfokus pada bidang ekonomi saja, maka penelitian ini dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya dengan membahas dan berfokus pada beberapa hal yang belum dijelaskan lebih dalam pada penelitian ini.

**Kata Kunci:** Diskriminasi; Muslim Uighur; Respon; Arab Saudi.

## Pendahuluan (Introduction)

Arab Saudi merupakan negara terluas yang berada di Kawasan Timur Tengah. Negara Islam ini dikenal sebagai negara yang cinta damai karena kebijakan luar negerinya yang berbasis *'Neighbour Friendly'*. Arab Saudi memiliki beberapa faktor yang mendasari politik luar negeri negaranya seperti agama, sejarah, georigrafis, ekonomi dan politik. Sebagai negara yang menjadi tempat lahirnya agama Islam, Arab Saudi pun menerapkan hukum syariat Islam di negaranya, yang kemudian membuat negara ini mengharuskan politik luar negerinya berprinsip Islam pula, hal inilah yang mendasari kebijakan Arab Saudi berbasis *'Neighbour Friendly'*.

*'Neighbour Friendly'* merupakan salah satu kebijakan politik luar negeri Arab Saudi yang terdepan. Salah satu ciri khas dari kebijakan *Neighbour Friendly* tersebut adalah kebijakan untuk tidak mengintervensi urusan internal negara lain demi menjaga hubungan baiknya dengan negara lain. Kebijakan tersebut muncul karena adanya dorongan dari beberapa aspek seperti aspek Lingkaran Islam dan aspek Kalangan Internasional.

Arab Saudi sebagai negara Islam, menjadikan 'Islam' sebagai hal yang sangat fundamental yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negaranya. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, selain mempertimbangkan negara – negara tetangganya, Arab Saudi juga sangat memprioritaskan hal – hal yang berlatar belakang Islam, karena tujuan dari kerajaan Arab Saudi ini tidak lain adalah untuk mencapai solidaritas Islam. Sebagai contoh nyatanya Arab Saudi kerap memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara – negara Islam dan menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan yang dialami oleh kelompok minoritas muslim di dunia, namun tidak mencampuri masalah yang sedang terjadi pada negara tersebut, seperti Arab Saudi menjadi negara yang memberikan bantuan terbesar kepada korban perang di Yaman dengan mengucurkan dana sebesar Rp. 7 Triliun (Garjito, 2020). Selanjutnya terkait kasus diskriminasi minoritas kelompok muslim, Arab Saudi pun menjadi negara paling tegas yang mengutuk kekerasan yang dialami oleh minoritas muslim Rohingya di Myanmar (Wijaya, 2017). Sebagai bentuk perhatian yang besar terhadap kasus diskriminasi kelompok minoritas muslim, Arab Saudi pun teken kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk beri bantuan kepada muslim Rohingya (Nursalikah, 2020), dan tercatat pada sebuah artikel berita bahwa Arab Saudi berikan bantuan senilai US\$ 50 juta kepada etnis Rohingya di Myanmar (Reuters, 2012).

Namun, sebagai negara yang berdaulat tentu saja Arab Saudi tetap mempertimbangkan baik buruknya dampak yang akan diterima oleh negaranya dari setiap keputusan yang diambil, karena sebagai negara berdaulat Arab Saudi tentu memiliki kepentingan yang ingin dicapai oleh negaranya. Berkaitan dengan hal ini, Arab Saudi menjadi lebih fleksibel dengan apa yang sedang dihadapi oleh negaranya, dan tentu saja Saudi akan mengambil sebuah keputusan yang menguntungkan bagi negaranya. Seperti pada kasus kemanusiaan yang terjadi di Xinjiang, China, Arab Saudi yang menyebutkan bahwa politik luar negerinya berlandaskan kepada nilai – nilai Islam, malah memutuskan untuk berpihak kepada pemerintah China dan memilih bungkam akan kasus tersebut, hal ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya mengapa Arab Saudi mengambil sikap yang berbeda pada kasus ini, karena pada kasus kemanusiaan sebelumnya seperti diskriminasi kelompok minoritas muslim Rohingya di Myanmar, Arab Saudi menjadi negara yang paling gencar untuk memberikan bantuan kepada kelompok minoritas tersebut. Perbedaan sikap Arab Saudi yang bertolak belakang pada kasus yang tak jauh berbeda ini mendorong penulis untuk menginvestigasi lebih dalam tentang apa alasan dibalik sikap Arab Saudi tersebut.

Sikap Saudi yang memihak kepada pemerintah China dan memilih bungkam atas kasus tersebut adalah bukti bahwa isu kemanusiaan ini sudah tercium hingga ke ranah internasional. Jika pada isu kemanusiaan ini ada negara yang mendukung pemerintah China, maka juga pasti ada negara yang mendukung kelompok minoritas Uighur. Mengingat respon dunia internasional terhadap isu kemanusiaan di Xinjiang, China ini terbagi kedalam dua kubu yaitu kubu pendukung dan oposisi China, dan melihat fakta bahwa mayoritas kubu pendukung China di isi oleh negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam termasuk Arab Saudi, maka hal ini patut di pertanyakan.

Arab Saudi sebagai negara Islam yang menjadikan ‘Islam’ sebagai hal dasar yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya dan memprioritaskan hal – hal yang berlatar belakang Islam, **lantas mengapa negara yang menjadi representasi Islam ini malah memilih untuk mendukung otoritas China atas tindakannya terhadap minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China?** Artikel jurnal ini akan mengupas tentang alasan Arab Saudi dibalik sikap dan tindakan yang mereka ambil. Selanjutnya artikel jurnal ini menggunakan teori Pilihan Rasional untuk menjawab pertanyaan diatas.

Artikel jurnal dengan judul ‘Alasan Pemerintah Arab Saudi Mendukung China dalam Kasus Diskriminasi Muslim Uighur’ ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan Pilihan Rasional untuk menganalisa sikap dari pemerintah Arab Saudi di balik keputusan mereka. Sumber – sumber yang digunakan pada penelitian ini berasal dari kumpulan literatur akademik seperti jurnal dan makalah, serta kumpulan dari beberapa artikel jurnalistik.

## **Pembahasan (discussion)**

### *Teori Pilihan Rasional*

Dalam dunia hubungan internasional, ada banyak teori yang digunakan oleh para peneliti guna dijadikan sebagai sebuah alat untuk menganalisis suatu fenomena. Diantara banyak teori dalam hubungan internasional, Teori Pilihan Rasional menjadi salah satu teori yang populer untuk dijadikan alat dalam menganalisa tindakan seorang aktor dalam suatu fenomena. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam Teori Pilihan Rasional ini adalah James Coleman (1990) (Rosidin, 2020). Prinsip dasar teori pilihan rasional ini berasal dari ekonomi neoklasik, dimana sebenarnya sudah lama muncul asumsi bernuansa ekonomi yang memprediksi bahwa perilaku pelaku ekonomi selalu dimotivasi atas dasar uang atau profit (Rosidin, 2020). Coleman juga menggagaskan bahwa bagi aktor rasional yang berasal dari ekonomi, dalam memilih sebuah tindakan aktor tersebut akan cenderung memaksimalkan ‘utilitas’ yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Mengacu kepada ekonomi klasik, lambat laun dan secara bertahap teori pilihan rasional sudah diterapkan tidak hanya pada bidang ekonomi saja, namun sudah mulai diterapkan pada bidang sosiologi, psikologi, dan ilmu politik (Jatmika, S & Nabilaazka, 2020). Pilihan rasional, merupakan suatu tindakan yang ‘rasional’ dari seorang aktor guna melakukan suatu tindakan berdasarkan pada tujuan tertentu, dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Kata ‘rasional’ dalam teori ini dimaknai secara khusus dan sempit, tidak seperti sebagaimana kata ‘rasional’ yang digunakan dalam kehidupan keseharian. Makna kata ‘rasional’ dalam teori ini yaitu ‘tindakan – tindakan yang dilihat seolah – olah sebagai sebuah pertimbangan biaya atau kerugian (*costs*) dan keuntungan (*benefits*)’ (Rosidin, 2020).

Teori pilihan rasional ini memiliki fokus terhadap aktor, karena pada teori ini, aktor dipandang sebagai subjek yang memiliki tujuan atau maksud yang mana nantinya segala tindakan dari aktor tersebut akan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Umumnya, teori pilihan rasional ini berawal dari sebuah pemahaman, dimana manusia berperan sebagai seorang aktor rasional yang menggunakan perhitungan rasional berdasarkan informasi yang sudah tersedia, sehingga aktor tersebut dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam menentukan suatu tindakan. Namun, dalam menggunakan teori rasional ini tidak serta merta hanya melibatkan satu orang saja dalam proses pembuatan kebijakan atau proses pengambilan keputusannya (Warsito, 2017). Yang menjadi aktor dalam teori ini tidak hanya manusia saja (individu), namun negara dan organisasi internasional pun juga dapat menjadi aktor, dan seorang aktor dalam teori ini disebut dengan ‘aktor rasional’. Pada penelitian ini, penulis akan membedah kasus yang sedang diteliti menggunakan Teori Pilihan Rasional ini dan melihat dari sudut pandang ‘negara’ sebagai aktor rasionalnya.

Jika dipandang dari kaca mata politik negara, pilihan atau preferensi politik dapat diartikan sebagai sebuah kecenderungan untuk menata sebuah perilaku politik secara logis, yang dilakukan oleh para elit politik suatu negara untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam mencapai tujuan politik tertentu. Secara umum, beberapa aspek yang melatarbelakangi pertimbangan rasionalitas politik suatu negara adalah sebagai berikut: *survival*, *security*, *economy/welfare*, *prestige*, dan *influence* (Warsito, 2017). Aspek – aspek tersebut memiliki sifat saling ketergantungan, yang mana membuat seluruh aspek tersebut termasuk dalam tolak ukur rasionalitas suatu negara. Pertama *survival*, bermula dari anggapan Neorealis yang menyebutkan bahwa sistem internasional yang berlaku pada saat ini adalah sistem yang anarki, maka negara di seluruh dunia dituntut untuk bisa *survive* atau bertahan, hal ini lah yang menjadikan *survival* sebagai salah satu aspek terpenting dalam rasionalitas politik suatu negara. Kedua *security*, untuk suatu negara dapat bertahan maka dibutuhkan yang namanya keamanan. Bentuk keamanan dan pertahanan pada setiap negara berbeda – beda, namun setiap negara pasti memiliki sistem keamanan dan pertahanan untuk bisa bertahan di sistem internasional yang anarki. Ketiga *economy/welfare*, aspek ekonomi menjadi salah satu aspek pendukung terpenting, karena untuk suatu negara dapat bertahan dan membangun sistem keamanan dan pertahanan negara, maka negara tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh karena itu *economy/welfare* menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan rasionalitasnya. Keempat *prestige* atau kehormatan, setelah suatu negara dapat bertahan hidup di sistem internasional yang anarki ini, maka tahap selanjutnya adalah menjaga kehormatan dan nama baik negara. Kehormatan yang terjaga akan membukakan pintu gerbang bagi suatu negara untuk bisa melakukan banyak hal, hingga hal ini juga patut dipertimbangkan segi rasionalitasnya. Kelima *influence* atau pengaruh, negara yang berhasil bertahan dengan keamanan yang baik dan ekonomi yang kuat hingga menciptakan citra negara yang baik pula, maka akan dapat memberikan pengaruh pada negara lain hingga memiliki pengaruh pada sistem internasional. Negara yang memiliki pengaruh di dunia tentu akan mendapat akses untuk mengendalikan banyak hal yang akan menguntungkan bagi negaranya, hingga banyak negara yang berlomba – lomba untuk dapat mencapai posisi ini. Bertahan hidup di lingkungan yang anarki menjadi sebuah hal yang sangat fundamental bagi suatu negara untuk dapat terus berkembang hingga menjadi negara yang maju, dan untuk suatu negara dapat bertahan maka dibutuhkannya aspek pendukung seperti keamanan dan ekonomi, yang jika sudah berhasil bertahan, lalu menjaga kehormatan dan menjadi negara yang berpengaruh adalah langkah akhir untuk menuju puncak kejayaan bagi suatu negara. Maka dapat

disimpulkan bahwa kelima aspek tersebut saling berkesinambungan dan jelas merupakan hal yang *crusial* untuk menjadi pertimbangan rasionalitas politik suatu negara.

Beberapa aspek yang sudah di jelaskan diatas kemudian dijadikan sebagai sumber informasi bagi aktor rasional agar dapat melakukan proses analisis kebijakan yang akan ia ambil ketika menghadapi suatu fenomena. Pada proses analisis kebijakan, terdapat tiga langkah – langkah yang harus dilalui oleh aktor rasional. Langkah pertama yaitu menentukan kebijakan – kebijakan alternatif, dimana kebijakan alternatif ini adalah berupa pilihan tindakan atau keputusan yang akan diambil oleh aktor rasional. Pada langkah ini aktor rasionalpun akan dengan langsung menyesuaikan apa yang menjadi kepentingan negaranya dan aspek apa yang melatarbelakangi kepentingannya tersebut ketika berhadapan dengan suatu fenomena tertentu. Langkah selanjutnya adalah memperkirakan dan mengkalkulasikan *cost* dan *benefit* dari masing – masing pilihan kebijakan alternatif yang sudah disediakan sebelumnya. Pada langkah inilah aktor rasional akan menyesuaikan antara kepentingan apa yang ingin ia capai dengan fenomena apa yang sedang ia hadapi, yang tentu saja kepentingan – kepentingan tersebut dilatarbelakangi oleh satu atau lebih aspek dari lima aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah ini juga dapat dikatakan sebagai langkah inti, karena pada langkah inilah proses analisis tersebut terjadi. Langkah terakhir adalah kesimpulan. Pada langkah ini yang harus dilakukan oleh aktor rasional adalah menyimpulkan kebijakan mana yang ingin ia ambil, dan tentu saja aktor rasional akan mengambil sebuah keputusan yang paling menguntungkan bagi negaranya yaitu keputusan dengan maksimal keuntungan dan minimal kerugian. Proses dengan segala langkah – langkahnya tersebutlah yang dikatakan dengan ‘Pilihan Rasiolnal’.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini akan menjelaskan tentang alasan dibalik keputusan Arab Saudi, melihat aspek apa yang melatarbelakangi keputusan Arab Saudi tersebut dan membedah proses analisis kebijakan hingga ditetapkannya keputusan Arab Saudi untuk mendukung otoritas China atas kasus diskriminasi muslim Uighur di Xinjiang, China.

Berbeda dengan penelitian tentang isu diskriminasi muslim Uighur sebelumnya, yang dilakukan oleh Jonathan Gery Boy pada tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlakuan Diskriminatif Terhadap Etnis Minoritas (Studi Kasus : Etnis Muslim Uighur di China)” (Boy, 2014). Dimana pada penelitian tersebut Boy membahas dan mengulas tentang tinjauan Hukum Internasional terhadap kasus diskriminasi yang terjadi pada etnis minoritas khususnya etnis Uighur di Xinjiang, China, dan penelitian ini memiliki fokus pada pelanggaran – pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur. Kemudian juga terdapat penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Yuridis atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Etnis Uighur di China” yang dilakukan oleh James Senduk (Senduk, 2014). Pada penelitiannya, Senduk berfokus pada nilai – nilai HAM yang seharusnya di dapatkan oleh setiap manusia dan yang seharusnya juga mendapat perlindungan dari negara, termasuk etnis minoritas Uighur. Senduk pada penelitiannya juga menyampaikan upaya untuk memperjuangkan hak – hak etnis minoritas Uighur yang mana dapat ditempuh dengan dua cara, yang pertama yaitu melalui *World Uighur Congress*, dan yang kedua dengan cara memberikan tekanan kepada pemerintah China melalui aksi – aksi terror yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor internasional.

Selanjutnya, yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu mengangkat tema tentang isu ‘etnis minoritas’ dan isu ‘Hak Asasi

Manusia', dan lebih berfokus pada 'hukum pelanggaran HAM' yang dialami oleh etnis Uighur. Sedangkan penelitian ini mengangkat tema 'agama Islam', yang mana menurut penulis dan dari beberapa sumber yang penulis temukan, diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Uighur ini terjadi karena mereka beragama Islam dan berada di lautan orang Tionghoa. Fokus yang dimiliki oleh penelitian ini adalah tentang bagaimana respon suatu negara Islam dan apa alasan di balik respon tersebut.

### *China dan Isu Muslim Uighur*

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah terjadinya diskriminasi muslim Uighur oleh pemerintah China, bagaimana respon muslim Uighur atas perlakuan pemerintah China kepada mereka dan bagaimana respon dunia internasional serta respon negara – negara Islam terhadap kasus ini. Pembahasan pada bagian ini akan dibagi ke dalam tiga sub judul. Sub judul pertama akan menjelaskan tentang China dan isu muslim Uighur, sub judul kedua akan menjelaskan tentang bagaimana respon dari dunia internasional dan negara – negara Islam khususnya Arab Saudi, dan sub judul ketiga akan menjelaskan tentang apa alasan Arab Saudi dibalik keputusannya yang memilih untuk berpihak kepada pemerintah China.

Seperti yang sudah di sebutkan sebelumnya pada bagian pendahuluan, dimana kelompok minoritas muslim Uighur di Xinjiang, China mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah China. Kilas balik pada tahun 2009 silam, terjadi sebuah demonstrasi besar – besar di Xinjiang, yang di lakukan oleh kelompok etnis minoritas di daerah tersebut yaitu etnis Uighur. Demonstrasi yang terus terjadi dari tahun 1990-an ini dipicu karena etnis Uighur mengklaim bahwa Xinjiang tersebut adalah negaranya dan mendeklarasikan kemerdekaannya dengan nama Turkestan Timur, namun hal ini di bantah oleh China. Menurut catatan sejarah, etnis Uighur yang menetap di daratan Barat China, tepatnya di provinsi Xinjiang, merupakan bangsa keturunan klan Turki, dengan menyebut daerah tempat mereka menetap itu dengan nama Uighuristan atau Turkestan Timur, dan bukan bagian dari wilayah China (Sumeks.co, 2019). Sejarah juga menyebutkan bahwa, bangsa Uighur yang merdeka telah menetap di Uighuristan selama lebih dari 2000 tahun (Sumeks.co, 2019). Etnis Uighur berani menegaskan bahwa daerah Uighuristan itu bukan bagian dari daratan China, karena pada abad ke-20, melalui ekspedisi keilmuan dan arkeologis di wilayah Jalur Sutra, di Uighuristan ditemukan peninggalan – peninggalan kuno bangsa Uighur berupa candi – candi, reruntuhan biara, lukisan dinding, dan barang - barang lainnya, juga termasuk buku dan dokumen (Sumeks.co, 2019). Penjelajah asal Eropa, Amerika Serikat dan Jepang percaya bahwa barang - barang tersebut adalah peninggalan bangsa Uighur, dan bukan merupakan peninggalan dari sejarah China (Ariefyanto, 2012). Tetapi China tetap mengklaim bahwa daerah tersebut merupakan warisan dari sejarahnya, karena itulah daerah Xinjiang tidak dipisahkan dari China. Sehingga mulai dari tahun 1884, wilayah tersebut sudah berada dibawah kendali Beijing dan secara resmi ditetapkan sebagai Provinsi yang disebut Xinjiang atau Perbatasan Baru (Saputra, 2019b). Namun Uighur mengatakan bahwa klaim China terhadap wilayah tersebut tidak berdasar, dan China dianggap sengaja menginterpretasikan sejarah dengan salah, hanya demi kepentingan ekspansi wilayahnya saja.

Semenjak daerah tersebut berada dibawah kendali China, pemerintah China mendorong etnis Han (kelompok etnis mayoritas negara) untuk pindah ke wilayah Xinjiang, hingga akhirnya populasi etnis Han ini menyaingi kelompok etnis Uighur sebagai salah satu kelompok etnis terbesar

di Xinjiang. Pindahannya etnis Han ke daerah tersebut menimbulkan kecemburuan dan kebencian antar kelompok etnis, yang mana pemerintah China tampak lebih mengistimewakan kelompok etnis Han dibandingkan etnis muslim Uighur, sebagai salah satu contohnya pekerjaan – pekerjaan terbaik hanya bisa dimiliki oleh kelompok etnis Han saja, sehingga kelompok etnis Han memiliki dinamika ekonomi yang lebih baik daripada bangsa muslim Uighur (Utomo, 2018). Bersamaan dengan hal tersebut, otoritas – otoritas China mulai menguasai wilayah Xinjiang, mulai banyak hal – hal yang diatur oleh pemerintah China, hingga melarang melakukan kegiatan tertentu khususnya dalam kegiatan keagamaan. Ajaran agama Islam yang sudah dipeluk oleh orang – orang Uighur sejak tahun 934 (Ariefyanto, 2012), seketika kegiatan – kegiatan ibadah mereka dibatasi secara keras oleh pemerintah China. Mulai dari penutupan masjid – masjid yang sudah dibangun sejak lama, larangan berpuasa untuk setiap pegawai negeri muslim selama bulan suci Ramadhan, hingga dilarangnya menjalankan sholat 5 waktu (BBC, 2018). Terdapat dua alasan yang melatar-belakangi segala macam bentuk pelarangan dan pembatasan tersebut, yang pertama yaitu karena perbedaan agama, dimana bangsa Uighur adalah bangsa yang berideologi Islam yang berada di tengah – tengah bangsa penganut ideologi Komunis. Yang kedua adalah karena etnis Uighur merupakan etnis minoritas yang berada ditengah lautan etnis Han. Menurut Direktur Institut Islam Global Universitas Frankfurt, Prof. Dr. Susanne Schröter, cara barbarik tersebut merupakan metode yang lazim digunakan Partai Komunis China untuk memaksa etnis minoritas untuk tunduk pada ideologi yang mereka anut (Ebbighausen, 2019).

Melihat semua batasan dan larangan yang diberikan oleh pemerintah China terhadap mereka, etnis Uighur tidak lantas hanya berdiam diri. Pada tahun 1990-an, warga Uighur mulai bersuara dan memprotes kesenjangan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas China terhadap mereka (Saputra, 2019b). Bangsa Uighur menuntut hak dan perlakuan sama seperti yang di dapatkan oleh kelompok etnis lainnya di Xinjiang, mereka memprotes semua batasan dan larangan beribadah yang diberikan hanya untuk muslim Uighur saja. Namun aksi demonstrasi bangsa muslim Uighur dipandang sinis oleh pemerintah China yang berideologi Komunis ini. Mereka mencurigai aksi protes bangsa muslim Uighur terhadap otoritas China itu sebagai bentuk pembangkangan dan gerakan separatis. Di dukung oleh tragedi 9/11 di Amerika Serikat, pemerintah China mendapat celah pembenaran atas tindakannya terhadap muslim Uighur yang disebutnya sebagai bagian dari aksi perang global melawan terorisme (Saputra, 2019b). Pemerintah China menganggap semua larangan dan batasan yang mereka berikan untuk muslim Uighur ini adalah bentuk ‘pendidikan ulang’ dengan tujuan agar muslim Uighur tidak melakukan pemberontakan dan agar tidak melahirkan bibit – bibit teroris. Karena sudah mendapat celah pembenaran atas tindakannya terhadap muslim Uighur, China menjadi semakin leluasa untuk terus memberikan perlakuan yang bisa dikatakan tidak manusiawi terhadap muslim Uighur.

### *Respon Dunia Internasional dan Arab Saudi*

Isu ketidakadilan hingga kekerasan yang dialami oleh bangsa muslim Uighur ini tercium sampai ke ranah internasional, sehingga turut mengundang perhatian dunia internasional untuk ikut mengomentari tindakan China atas etnis Uighur bahkan menjadi isu yang berulang kali dibicarakan di kursi PBB. Respon dunia internasional terhadap isu kemanusiaan muslim Uighur di China ini lantas terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu pendukung etnis muslim Uighur dan kubu pendukung otoritas China. Ada sedikit kejanggalan pada respon dunia terhadap isu kemanusiaan di China ini, dimana negara – negara barat yang penduduknya mayoritas beragama non muslim seperti Inggris,

Perancis, Jepang, Australia, Kanada, Selandia Baru dan 18 negara Eropa lainnya berada pada kubu yang mendukung bangsa muslim Uighur dan mengecam perbuatan China atas muslim Uighur (Saputra, 2019a). Bentuk dukungan yang diberikan oleh negara – negara barat kepada muslim Uighur ini berupa pengajuan surat pernyataan yang diajukan kepada Komisaris Tinggi PBB, dimana surat ini mendesak pemerintah China untuk menghentikan penahanan dan penindasan massal yang dilakukan semena – mena (Saputra, 2019a). Menurut laporan New York Times, surat itu disampaikan pada hari Senin dan dirilis pada hari Rabu, 11 Juli 2019 (Saputra, 2019a). Sebaliknya, terdapat banyak negara Islam yang penduduknya mayoritas beragama Islam malah mendukung tindakan otoritas China, termasuk Arab Saudi (Ebbighausen, 2019). Dukungan yang diberikan oleh negara – negara Islam kepada pemerintah China adalah, pertama dengan tidak ikut berkomentar buruk tentang apa yang dilakukan oleh China kepada saudara – saudara muslim mereka di Xinjiang atau dengan kata lain negara – negara Islam ini memilih untuk bungkam atas kasus diskriminasi tersebut. Kedua, negara – negara tersebut juga menandatangani surat dukungan untuk China yang dikirimkan untuk Dewan HAM PBB dan Komisioner Tinggi HAM PBB (Raharjo, 2019). Berikut adalah beberapa negara yang menandatangani surat dukungan untuk China yang mana mayoritasnya adalah negara Islam : Aljazair, Angola, Bahrain, Belarusia, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Kepulauan Komoro, Pakistan, Kuba, Republik Demokrat Kongo, Mesir, Eritrea, Gabon, Kuwait, Laos, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Zimbabwe (Raharjo, 2019).

Yang menarik dan menjadi sorotan pada penelitian ini adalah respon dari Arab Saudi. Arab Saudi yang mengaku bahwa negaranya adalah negara Islam yang menjadikan ‘Islam’ sebagai suatu hal yang paling mendasar yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya dan selalu memprioritaskan masalah – masalah yang berhubungan dengan Islam khususnya masalah kelompok minoritas muslim di dunia, malah melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan apa sudah menjadi ciri khas dari negaranya pada kasus diskriminasi Uighur ini. Arab Saudi bungkam dengan tak berikan komentar apapun tentang kasus tersebut seakan tak peduli. Arab Saudi pun menjadi salah satu dari 37 negara yang menandatangani surat dukungan untuk China saat kasus tersebut menyentuh kursi PBB, surat tersebut dikirimkan untuk Dewan HAM PBB dan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet pada Jum’at, 12 Juli 2019 (Raharjo, 2019). Arab Saudi dan 36 negara lainnya setuju dengan pembelaan pemerintah China yang menyebutkan bahwa tindakan yang mereka lakukan pada muslim Uighur itu adalah sebagai ‘pusat pelatihan’ yang membantu menghilangkan ekstrimisme dan memberi keterampilan baru, bahkan pada suatu kesempatan ketika ditanya tentang dukungan Saudi, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB pun menjawab “Tidak ada yang bisa lebih peduli tentang status muslim dimana pun di dunia selain Arab Saudi. Apa yang kami katakan pada surat itu adalah kami mendukung kebijakan pembangunan China yang telah mengangkat orang keluar dari kemiskinan” (Aryani, 2019), begitu kata pembelaan Duta Besar Arab Saudi untuk China. Masih seputar dukungan Arab Saudi untuk China, pada suatu kunjungan kenegaraan Arab Saudi ke Tiongkok, putra mahkota Mohammed bin Salman mengatakan langsung pada presiden China Xi Jinping bahwa Arab Saudi menghormati hak – hak China untuk mengambil tindakan kontraterorisme dan deekstrimisme untuk menjaga keamanan nasional negaranya. Bahkan di suatu kesempatan pada tahun 2009, ketika pasukan keamanan China mengalami bentrok dengan kelompok pengunjuk rasa Uighur, seorang juru bicara Kementrian Luar Negeri Arab Saudi sempat

menyalahkan kelompok muslim Uighur yang memberontak dengan menyebutkan “Seorang muslim yang baik harus menjadi warga negara yang baik, di China atau negara lain”.

Dari penjelasan diatas dan lengkap dengan sumber – sumber yang didapatkan oleh penulis, maka tampak jelas bahwa Arab Saudi peduli sama sekali dengan apa yang terjadi pada kelompok minoritas muslim Uighur, padahal sebelumnya Arab Saudi selalu hadir dan tak jarang menjadi negara terdepan yang memberi bantuan kemanusiaan pada kasus – kasus yang berbau Islam, seperti pada perang Yaman, Arab Saudi menjadi negara yang memberi bantuan terbesar untuk korban perang di Yaman, dan pada kasus diskriminasi kelompok minoritas muslim Rohingya di Myanmar pun Arab Saudi rela teken kontrak kerjasama dengan Amerika Serikat untuk berikan bantuan kepada kelompok minoritas Rohingya. Namun pada kasus diskriminasi kelompok minoritas muslim di Xinjiang, Arab Saudi tak berikan perlakuan yang sama.

### *Alasan Dibalik Sikap Arab Saudi*

Setiap sikap dan keputusan yang diambil pasti memiliki alasan, sama halnya seperti dibalik tindakan dan keputusan yang diambil oleh Arab Saudi untuk mendukung otoritas China ini, pasti terdapat alasan yang kuat hingga Saudi sanggup mempertaruhkan nama baik negaranya dihadapan seluruh masyarakat internasional. Titik puncak ‘rasional’ tidak pernah sama bagi tiap – tiap aktor dalam memandang suatu fenomena. Pada penelitian ini Arab Saudi yang berperan sebagai aktor rasional dan sebagai sebuah negara yang berdaulat tentu memiliki suatu kepentingan nasional yang ingin dicapai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian kerangka berpikir, bahwa terdapat beberapa aspek yang melatarbelakangi pertimbangan rasionalitas politik suatu negara dimana aspek ini juga akan menjadi kepentingan nasional negara tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa aspek yang mempengaruhi sikap dan keputusan Arab Saudi menjadi berbeda dalam menanggapi kasus diskriminasi muslim Uighur adalah aspek Ekonomi.

Penulis menemukan beberapa fakta terkait alasan dibalik sikap Arab Saudi pada kasus diskriminasi Uighur yang seolah – olah tak sejalan dengan apa yang sudah Saudi katakan tentang apa yang menjadi fokus negaranya, yang pertama yaitu Arab Saudi sudah masuk ke dalam perangkap yang sudah di siapkan oleh China. Perangkap China yang dimaksud adalah seperti, China menyusun strategi untuk mendapatkan dukungan dari banyak negara khususnya negara Islam atas tindakannya terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah melakukan investasi besar – besaran kepada negara – negara di Timur Tengah, Asia dan Afrika sebagai bagian dari insiatif kebijakan luar negeri China atau *Belt and Road Initiative (BRI)*. Investasi yang diterima oleh negara – negara di wilayah tersebut termasuk Arab Saudi mulai dari infrastruktur hingga telekomunikasi. Melalui kebijakan BRI ini, pemerintah China berhasil membuat negara – negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Islam bungkam terhadap tindakan yang dilakukannya di Xinjiang (Nashrullah, 2020). Kedua, para pemimpin Arab Saudi tidak berani ambil resiko yang dapat menimbulkan percikan konflik dengan China, karena China merupakan mitra dagang terbesar Saudi. Baru – baru ini ada banyak kesepakatan yang dicapai oleh China dan Arab Saudi, hingga menjadikan China sebagai mitra utama Saudi dalam rancangan pembangunan Visi Arab Saudi pada tahun 2030 mendatang (Nashrullah, 2020). Ketiga, pada suatu kunjungan kenegaraan China menarwarkan Arab Saudi untuk menandatangani perjanjian kerja sama dalam bidang ekonomi dengan China senilai US\$28 Miliar, atau setara dengan Rp. 389 Triliun (Navlakha, 2109). Tawaran ini tentu menjadi salah satu hal yang tak mungkin di lewat kan

oleh Arab Saudi, dan juga menjadi hal yang membuat Arab Saudi semakin bergantung dengan China, hingga Saudi harus terus mempertahankan hubungan baiknya dengan China. Keempat, Saudi-China sudah terikat janji untuk membentuk usaha gabungan guna mengembangkan produksi petrokimia kompleks di wilayah tenggara Provinsi Liaoning, China, yang bernilai US\$10 Miliar. Kemudian otoritas saham Arab Saudi juga menyatakan bahwa ada penandatanganan sebanyak 35 MoU tidak terikat senilai US\$28 Miliar, terkait energi, pertambangan, transportasi dan perdagangan daring (Jazeera, 2019).

Dari beberapa temuan diatas jelas bahwa ekonomi adalah aspek yang mempengaruhi rasionalitas Arab Saudi sebagai aktor rasional, dan ekonomi pula yang menjadi kepentingan nasional yang ingin dicapai Arab Saudi sebagai negara berdaulat. Namun sikap dan keputusan yang diambil oleh Arab Saudi ini bukan bentuk keputusan yang spontan, sebagai aktor rasional Arab Saudi sudah lebih dulu melalui proses analisis kebijakan dengan mempertimbangkan dan mengkalkulasikan keuntungan dan kerugian yang akan ia dapatkan dari masing – masing opsi keputusan yang akan diambil. Disini yang menjadi pilihan keputusan yang akan diambil oleh Arab Saudi adalah pertama memilih untuk mendukung muslim Uighur, kedua memilih untuk mendukung pemerintah China. Masing – masing dari opsi tersebut tentu saja memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri, dimana pada akhirnya keputusan yang dipilih oleh Saudi sebagai aktor rasional adalah keputusan dengan maksimal keuntungan dan minimal kerugian.

Berikut adalah tabel Pilihan Rasional yang dihadapkan kepada Arab Saudi sebagai seorang aktor rasional untuk menanggapi isu kemanusiaan di Xinjiang, China :

**Tabel 1. Tabel Pilihan Rasional**

Kebijakan Alternatif	Konsiderasi Rasional		Kesimpulan
	Keuntungan	Kerugian	
Mendukung muslim Uighur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arab Saudi akan mendapat respect dari masyarakat dunia karena memiliki sifat loyalitas tinggi dan dianggap sangat peduli dengan saudara sesama muslim</li> <li>- Arab Saudi akan menjadi contoh atau panutan bagi negara Islam lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan diplomatik dengan China akan rusak</li> <li>- Akan merusak kerjasama di berbagai bidang antara Arab Saudi dan China. Seperti pada bidang ekonomi khususnya ekspor-impor minyak mentah dengan China, Arab Saudi akan mengalami kerugian sebesar US\$29,1 M dalam jangka 1 tahun (OEC, 2017).</li> <li>- Bisa saja mendapat ancaman dari China, karena Arab Saudi dianggap ikut campur</li> <li>- Arab Saudi kehilangan</li> </ul>	Alternatif pertama tidak rasional karena memiliki banyak kerugian.

		mitra dagang terbesar	
Mendukung otoritas China	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan diplomatik dengan China terjaga dengan baik</li> <li>- Kerjasama dalam berbagai bidang terjaga</li> <li>- Ada kemungkinan untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara</li> <li>- Akan mendapat kepercayaan dari pihak China</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arab Saudi akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat internasional, karena dianggap mengkhianati saudara sesama muslim</li> </ul>	Alternatif kedua adalah alternatif yang rasional karena memiliki banyak keuntungan bagi Arab Saudi, dan memiliki kerugian yang sedikit.

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa terdapat 2 opsi yang dihadapkan kepada Arab Saudi sebagai aktor rasional. Yang mana opsi pertama yaitu opsi untuk mendukung Muslim Uighur dan opsi yang kedua adalah opsi untuk mendukung otoritas China. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian ‘Kerangka Berpikir’, seorang aktor rasional dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan harus mempertimbangkan *costs* dan *benefits* nya, agar keputusan atau kebijakan tersebut dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dari pada kerugian bagi aktornya.

Dalam kasus ini, jika Arab Saudi sebagai aktor rasional memilih untuk mengambil opsi pertama yaitu mendukung Muslim Uighur, maka Arab Saudi hanya akan memperoleh 2 keuntungan atau *benefits* saja, dan yang mana keuntungan itu hanya sebatas ‘kata apresiasi dan panutan’ saja, namun tidak akan berdampak secara significant bagi Arab Saudi. Selanjutnya, jika Arab Saudi memutuskan untuk memilih opsi pertama, maka Saudi akan mendapat lebih banyak kerugian dari pada keuntungannya. Dampak dari kerugian yang didapatkan oleh Arab Saudi jika memilih opsi pertama ini, akan dirasakan secara significant oleh Arab Saudi. Seperti halnya pemutusan kerjasama ekonomi antara Saudi dan China, yang akan sangat merugikan bagi Saudi karena sedikit banyaknya akan berdampak buruk kepada keadaan ekonomi internal negaranya.

Selanjutnya, jika pada kasus ini Arab Saudi sebagai aktor rasional memutuskan untuk memilih opsi kedua, yaitu mendukung otoritas China, maka Saudi akan mendapatkan banyak keuntungan yang mana akan berdampak secara significant bagi negaranya, dalam kata lain keuntungan yang akan didapatkan Saudi ini bisa langsung dirasakan manfaatnya dalam bentuk yang ‘nyata’. Seperti misalnya, jika Saudi mendapat kepercayaan dari pemerintah China, otomatis China akan cenderung lebih sering memberi tawaran kepada Saudi untuk melakukan kerjasama dalam bidang apa saja, yang mana hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi Arab Saudi, dan keuntungan tersebut dapat dirasakan secara nyata, atau tidak hanya sebatas bentuk kata apresiasi. Selain itu pula, kerugian yang di dapat oleh Arab Saudi jika memilih opsi kedua, cenderung lebih sedikit dibandingkan opsi yang pertama. Lagi pula, kerugian yang akan di dapat oleh Saudi hanya berupa sanksi sosial yang mana akan hilang seiring berjalannya waktu, dan nama Arab Saudi yang menjadi buruk karena tidak mendukung Muslim Uighur akan segera membaik seiring dengan

memudarnya isu tersebut. Pengembalian nama baik suatu negara dapat ditebus dengan beberapa cara nantinya jika isu yang bersangkutan tidak lagi tercium sampai ke ranah internasional.

Dari kedua penjelasan pengambilan opsi diatas, dapat disimpulkan bahwa opsi yang paling rasional menurut Arab Saudi adalah opsi kedua, yaitu mendukung otoritas China. Titik puncak ‘rasionalitas’ disini dipandang dari kaca mata Arab Saudi yang berperan sebagai aktor rasional, bukan dari sudut pandang atau kaca mata aktor lainnya. Opsi kedua menjadi opsi yang paling rasional, karena opsi tersebut mengandung lebih banyak keuntungan atau *benefits* dan mengandung lebih sedikit kerugian atau *costs* dibandingkan dengan opsi yang lainnya. Dimana, hal ini dapat diselaraskan dengan makna dari Teori Pilihan Rasional, yang mana pengambilan suatu keputusan atau kebijakan itu harus memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa titik puncak ‘rasionalitas’ itu berbeda pada tiap – tiap aktor, maka dalam kasus ini yang menjadi tolak ukurnya adalah Arab Saudi sebagai aktor rasional. Walaupun opsi kedua tersebut terlihat sangat apatis dan egois jika di lihat dari sudut pandang yang berbeda, namun opsi tersebut tetap menjadi opsi yang paling menguntungkan bagi sang aktor rasional yaitu Arab Saudi.

## Simpulan

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah negara berdaulat, setiap negara termasuk Arab Saudi memiliki pilihan - pilihan rasional yang menjadi prioritas dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Jika dalam kasus – kasus sebelumnya Arab Saudi cukup peduli pada masalah diskriminasi kelompok minoritas muslim dan bahkan memberikan bantuan kemanusiaan pada setiap kasus yang melibatkan golongan muslim, namun dalam kasus diskriminasi muslim Uighur Arab Saudi berikan respon yang berbanding terbalik, dimana Saudi memutuskan untuk mendukung otoritas China. Sikap Arab Saudi pada kasus diskriminasi kelompok minoritas Uighur menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi menjadi pilihan yang lebih rasional ketimbang masalah kemanusiaan dan solidaritas muslim. Keputusan ini menjadi pilihan yang paling rasional bagi Saudi, karena opsi untuk mendukung China memberikan banyak keuntungan bagi Saudi, dan kerugian yang akan didapatkan oleh Saudipun tak seberapa. Beberapa keuntungan yang di dapatkan oleh Arab Saudi dalam sektor ekonomi adalah ; China yang menjadi mitra utama Arab Saudi dalam rancangan pembangunan Visi Arab Saudi di tahun 2030 yang akan datang ; Saudi-China yang teken kerjasama ekonomi senilai US\$ 28 miliar pada suatu kunjungan kenegaraan Arab Saudi ke China ; serta kucuran dana investasi yang berlimpah dari pihak pemerintah China untuk Arab Saudi. Demi mencapai kepentingan ekonomi tersebut, pada akhirnya pemerintah Arab Saudi memberikan suara dan dukungan politiknya kepada pemerintah China. Salah satu bentuk dukungan Arab Saudi untuk pemerintah China adalah dengan bungkam dan tidak ikut berkomentar, apa lagi memberikan bantuan kepada muslim Uighur yang tertindas. Dukungan tersebut kemudian dipertegas dengan ikut sertanya Arab Saudi dalam penandatanganan surat dukungan untuk pemerintah China bersama dengan 36 negara lainnya, yang mana surat itu diserahkan kepada Dewan HAM PBB dan Komisaris Tinggi HAM PBB. Tak mudah bagi Arab Saudi untuk memilih satu diantara dua hal yang sama penting baginya, ketika dihadapkan dengan dua pilihan untuk memilih antara saudara seiman atau negaranya. Namun, pada kasus ini Arab Saudi berperan sebagai seorang aktor rasional, dimana sang aktor rasional akan cenderung memilih satu diantara beberapa opsi kebijakan yang akan sangat menguntungkan bagi negaranya. Selanjutnya, karena penelitian dengan judul ‘Alasan Pemerintah Arab Saudi Mendukung China dalam Kasus Diskriminasi Muslim Uighur’ ini terbatas dari segi

jangkauannya dengan hanya membahas dan berfokus pada bidang ekonomi saja, maka penelitian ini dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya dengan membahas dan berfokus pada beberapa hal yang belum dijelaskan lebih dalam pada penelitian ini seperti bidang politik dan lain sebagainya, agar penelitian terkait judul ini dapat menjadi penelitian yang lebih kompleks.

## Daftar Pustaka

- Ariefyanto, M. (2012). Siapakah Bangsa Uighur? *Republika.Co.Id.*  
<https://www.republika.co.id/berita/m0zcbk/siapakah-bangsa-uighur>
- Aryani, G. (2019). Arab Saudi Jelaskan Surat Dukungannya pada Kebijakan China di Xinjiang. *Antaraneews.Com.* <https://www.antaraneews.com/berita/966190/arab-saudi-jelaskan-surat-dukungannya-pada-kebijakan-china-di-xinjiang>
- BBC. (2018). Mengapa Terus Terjadi Ketegangan Antara Pemerintah China dan Suku Uighur. *BBC.Com.* <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601641>
- Boy, J. (2014). *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlakuan Diskriminatif Terhadap Etnis Minoritas (Studi Kasus : Etnis Muslim Uighur di China)*. Universitas Sumatera Utara.
- Ebbighausen, R. (2019). *Kenapa Negara Muslim Bungkam Terhadap China Soal Uighur*. *Dw.Com.*  
<https://www.dw.com/id/kenapa-negara-muslim-bungkam-terhadap-cina-soal-uighur/a-51528889>
- Garjito. (2020). *Arab Saudi Kucurkan Dana Rp. 7 Triliun untuk Membantu Yaman*. *Suara.Com.*  
<https://www.suara.com/news/2020/06/03/220235/arab-saudi-kucurkan-dana-rp-7-triliun-untuk-membantu-yaman?page=all>
- Jatmika, S & Nabilaazka, C. (2020). Why Aceh-Indonesia Conflict Resolution Can't be Copy-Paste in Bangsamoro-Philippines Issues? *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7–8.
- Jazeera, A. (2019). Menjijikan : Putra Mahkota Saudi Bela Upaya China “Perangi Terorisme” di Xinjiang. *Matamatapolitik.Com.* <https://www.matamatapolitik.com/news-x-mohammed-bin-salman-bela-upaya-china-perangi-terorisme-di-xinjiang/>
- Nashrullah, N. (2020). Peneliti Barat Ungkap Mengapa Negara Islam Diam Soal Uighur. *Republika.Co.Id.* <https://republika.co.id/berita/qdo2eb320/peneliti-barat-ungkap-mengapa-negara-islam-diam-soal-uighur>
- Navlakha, M. (2109). *Belasan Negara Islam Membela Tiongkok di PBB Soal Diskriminasi Terhadap Etnis Uighur*. *Vice.Com.* <https://www.vice.com/id/article/neaxyw/belasan-negara-islam-membela-tiongkok-di-pbb-soal-diskriminasi-terhadap-etnis-uighur>
- Nursalikah, A. (2020). Arab Saudi-AS Teken Kesepakatan Bantuan Muslim Rohingya. *Republika.Co.* <https://www.republika.co.id/berita/qjrsxe366/arabsaudias-teken-kesepakatan-bantuanmuslimrohingya>
- OEC. (2017). *The Best Way to Explore Trade Data*. <https://oec.world>
- Raharjo, B. (2019). Mengapa Saudi dan Negara Muslim Dukung Cina Soal Uighur? *NasionalRepublika.Co.Id.* <https://nasional.republika.co.id/berita/purg9k415/mengapa-saudi-dan-negara-muslim-dukung-cina-soal-uighur>

- Reuters. (2012). *Saudi Arabia Gives \$50 Million Aid to Myanmar Muslim*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-saudi-myanmar-muslims-idUSBRE87B06V20120812>
- Rosidin. (2020). Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah. *MediaNeliti.Com*. <https://media.neliti.com/media/publications/147175-ID-analisis-teori-pilihan-rasional-terhadap.pdf>
- Saputra, E. (2019a). 22 Negara Minta China Hentikan Penahanan Uighur di Xinjiang. *Dunia.Tempo.Co*. <https://dunia.tempo.co/read/1223662/22-negara-minta-cina-hentikan-penahanan-uighur-di-xinjiang/full&view=ok>
- Saputra, E. (2019b). Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang. *Dunia.Tempo.Co*. <https://dunia.tempo.co/read/1287193/sejarah-kekerasan-terhadap-etnis-uighur-di-xinjiang/full&view=ok>
- Senduk, J. (2014). *Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Studi Kasus : Diskriminasi Rasial Terhadap Etnis Uighur di China)*. Universitas Hassanudin.
- Sumeks.co. (2019). *Siapakah Sebenarnya Bangsa Uighur?* Sumeks.Co.
- Utomo, H. (2018). Siapa Sebenarnya Etnis Uighur dan Mengapa Berkonflik Dengan China? *Liputan 6.Com*. <https://www.liputan6.com/global/read/3841920/siapa-sebenarnya-etnis-uighur-dan-mengapa-berkonflik-dengan-china>
- Warsito, T. (2017). *Rasionalitas Politik*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wijaya, P. (2017). *Arab Saudi Kutuk Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/dunia/arab-saudi-kutuk-kekerasan-terhadap-muslim-rohingya.html>